

STRATEGI KOMUNIKASI “POLITIK TANPA MAHAR” KADERISASI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT WILAYAH RIAU

Chelsy Yesicha

Universitas Riau
chelsy.yesicha@lecturer.unri.ac.id

Abstract: *As agents of democracy, political parties have tasks that are not easy to do. Political parties serve as a channel for the aspirations of constituents and turn them into public policies. In addition, there is an important task that must be carried out by political parties, namely carrying out regeneration activities after going through the process of political recruitment. Caderization is the lifeblood of all organizations referred to as political parties, because the regeneration system is a very important process that is carried out in order to maintain continuity of leadership from one generation to the next. To obtain a qualified cadre, a systematic regeneration system is needed. This study aims to determine the political recruitment process of the Riau Regional Democratic Party in determining its cadres so that they are ready to face the 2019 legislative elections. This research focuses on recruitment conducted by NASDEM using the tagline "Politics without Mahar". It is dismissed that not always being a politician must be with dowry. The results of the study showed that the strategy in the political recruitment of legislative candidates used in the Riau DPW of the Nasdem Party used an open recruitment pattern. This pattern of recruitment is expected to be able to create qualified cadres and prospective legislative members. This is certainly complemented by party political education. So that the qualified legislative candidates are expected to be able to become vote cadres in the 2019 legislative elections later.*

Keywords: *Caderization, Political Message, Political Knowledge*

Abstrak : Sebagai agen demokrasi, partai politik mempunyai tugas yang tidak ringan. Partai politik bertugas sebagai penyalur aspirasi dari konstituen dan merubahnya menjadi kebijakan publik. Selain itu, ada tugas yang tidak kalah penting yang harus diemban oleh partai politik, yaitu melaksanakan kegiatan kaderisasi setelah melalui proses rekrutmen politik. Kaderisasi merupakan urat nadi bagi semua organisasi termaksud partai politik, karena sistem kaderisasi adalah sebuah proses yang sangat penting yang dilakukan demi menjaga kesinambungan kepemimpinan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Untuk memperoleh kader yang berkualitas, maka dibutuhkan sebuah sistem kaderisasi yang sistematis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses rekrutmen politik Partai Nasional Demokrat Wilayah Riau dalam menentukan kadernya sehingga siap menghadapi pemilu legislatif 2019. Penelitian ini mefokuskan pada rekrutmen yang dilakukan oleh NASDEM dengan menggunakan tagline “Politik Tanpa Mahar”. Hal ini menepis bahwa tidak selamanya menjadi politisi itu harus dengan mahar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi dalam rekrutmen politik calon anggota legislatif yang digunakan pada DPW Riau Partai Nasdem

menggunakan pola rekrutmen terbuka. Pola rekrutmen ini diharapkan mampu menciptakan calon kader dan calon anggota legislatif yang berkualitas. Hal ini tentunya dilengkapi dengan pendidikan politik partai. Sehingga calon anggota legislatif yang berkualitas ini diharapkan mampu menjadi kader pendulang suara dalam pemilu legislatif 2019 nanti.

Kata Kunci : Kaderisasi, Pesan Politik, Mahar Politik

A. Pendahuluan

1. Latar Belakang

Pasca Reformasi kebijakan terkait Pemilu sering berubah-ubah, hingga pada tahun 2009 diterapkan Pemilu diadakan 2 kali, yakni; Pemilu Legislatif (PILEG) dan Pemilu Presiden (PILPRES). Pemilu Legislatif merupakan ujung tombak kesuksesan partai politik yang akan di usung ke Pemilu Presiden sebab jika tidak meraup suara yang tinggi di seluruh Indonesia maka siapapun kandidat capres yang diusung oleh partai Politik tersebut tidak akan memiliki kesempatan untuk berkompetisi dalam PILPRES. Apalagi digandeng untuk berkoalisi partai yang menjadi ikut ke putaran tersebut.

Hal ini menjadikan Partai Politik harus maksimal dalam mempersiapkan calon Legislatif dalam Pileg. Partai harus selektif dalam menjaring calon yang memiliki nilai jual dengan *tread record* dan popularitas yang sangat diperhitungkan di mata masyarakat. Belum lagi persaingan antar partai politik yang semakin marak dan tumbuh subur saat ini membuat mereka harus benar benar memberikan jaminan yang berbeda dengan partai lain. Dibalik fenomena tersebut pungutan-pungutan yang menjadi beban bagi calon kader partai menjadi hal yang mengerikan bagi para kader karena mereka diwajibkan memiliki modal banyak ketika ingin mendaftarkan atau ketika nantinya terpilih duduk dikursi legislatif. Belum lagi tawaran yang sangat variatif, tawaran tersebut bukan saja hadir dari partai lama namun juga partai baru yang akan mememinangnya, misalnya akan mengalirkan modal kepada calon legislatif atau menempatkan nomor urut yang strategis untuk lolos duduk di legislatif. Jelang Pemilu persiapan partai politik mulai tampak mengeliat dengan berbagai janji tak kala harus melakukan rekrutmen untuk kesuksesan dalam pemilihan legislatif nanti.

Rekrutmen politik calon legislatif memegang peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Menjadi menarik ketika partai Nasional Demokrat mengusung tema “Politik Tanpa Mahar” dalam rekrutmen calon legislatif. Partai NasDem membuka pendaftaran untuk bakal calon kepala daerah yang akan bertarung "Kami menetapkan dan tetap menyatakan ini politik tanpa mahar," kata Ketua Tim VII Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai NasDem Enggartiasto Lukita di Kantor DPP NasDem, Jalan RP Soeroso, Gondangdia, Jakarta Pusat, Senin (7/3/2016).

Rekrutmen dan kaderisasi sangat penting karena menyangkut kualitas para calon pimpinan politik. Didalamnya sudah termasuk skema perekrutan,

pendidikan politik, penjaringan, hingga pencalonan dalam Pilkada. Dalam alam demokrasi, proses pemilihan pemimpin politik melalui dua tahapan. Tahap pertama adalah tahapan seleksi oleh parpol. Dalam tahap ini parpol yang paling bertanggung jawab untuk menyeleksi calon terbaik dengan kualifikasi, kompetensi dan *track record* yang terbaik untuk diserahkan kepada masyarakat untuk dipilih. Tahap kedua rakyat harus cerdas memilih calon terbaik karena keputusan akhir ada pada rakyat.

Persoalan lain yang bisa diurai ialah terkait internal partai politik. Parpol sering kali mengabaikan faktor kualifikasi, kompetensi dan *track record* seseorang. Partai politik lebih mengutamakan popularitas, elektabilitas dan isi tas. Akibatnya cukup serius, jabatan-jabatan publik diisi oleh orang-orang yang tidak punya kapabilitas dan orang pragmatis yang mengedepankan keuntungan pribadi bukan rakyat. (<http://partainasdem.id/2017/01/09/dinasti-politik-dan-gagalnya-kaderisasi-parpol/> akses 31032017, 01.30 wib)

Nasdem sebagai partai politik perlu memekarkan mempersiapkan diri dengan meyebarakan kekuatan jaringan ke daerah-daerah apalagi jika hal tersebut merupakan daerah lumbung periode terdahulu. Dengan ajakan *Nasdem Memanggil*, rekrutmen terbuka bakal calon legislatif di provinsi Riau pun dilaksanakan tak kurang dari 3 billboard tersedia dengan menampilkan 3 pimpinan nasdem di beberapa simpang jalan protokol di kota Pekanbaru janji politik tanpa mahar menjadikan iklan tersebut menjadi lebih menarik. Terkesan berani dan transparan ajak partai politik yang bernuasa biru ini menjadi lebih akrab dengan masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis bertujuan untuk mendeskripsikan strategi komunikasi “politik tanpa mahar” yang diterapkan oleh partai Nasional Demokrat. Penulis menggambarkan situasi yang terjadi sebagai realitas yang dilakukan oleh partai dalam kaderisasi bakal calon legislatif.

B. Tinjauan Teoritis

1. Hakekat Komunikasi Politik

Komunikasi politik sebagai layaknya darah, mengalirkan pesan-pesan politik berupa tuntutan, protes, dan dukungan (aspirasi dan kepentingan) ke jantung (pusat) pemrosesan sistem politik dan hasil pemrosesan itu, yang tersimpul dalam fungsi-fungsi *out put*, dialirkan kembali oleh komunikasi politik yang selanjutnya menjadi feedback sistem politik (Alfian, 1993: 1). Begitulah, komunikasi politik menjadikan sistem politik itu hidup dan dinamis.

Dengan lain perkataan, komunikasi politik menyambungkan semua bagian dari sistem politik, dan juga masa kini dengan masa lampau, sehingga dengan demikian aspirasi dan kepentingan dikonversikan menjadi berbagai kebijaksanaan. Bila mana komunikasi itu berjalan lancar, wajar, dan sehat maka sistem politik itu akan mencapai tingkat kualitas responsif yang tinggi terhadap perkembangan aspirasi dan kepentingan masyarakat serta tuntutan, perubahan zaman. Lebih jauh Alfian menggambarkan peranan penting komunikasi politik dalam memelihara dan meningkatkan kualitas kehandalan suatu sistem politik yang sudah mapan. Komunikasi politik mentransmisikan nilai-nilai budaya politik yang bersumber dari pandangan hidup atau ideologi bersama masyarakatnya

kepada generasi baru (anak-anak, remaja, dan pemuda), dan memperkuat proses pembudayaanannya dalam diri generasi yang lebih tua. (Alfian, 1993: 3-4).

Nimmo (1993) mendefinisikan komunikasi politik sebagai kegiatan komunikasi yang mempertimbangkan politik berdasarkan konsekuensi-konsekuensinya (aktual maupun potensial) yang mengatur perbuatan manusia dalam kondisi konflik). Sedangkan ahli politik yang lain mengatakan, bahwa komunikasi politik adalah komunikasi yang diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi tersebut dapat mengikat semua kelompok atau warganya, melalui suatu saksi yang ditentukan bersama oleh lembaga-lembaga politik. Sedangkan apabila dilihat dari tujuan politik an sich, maka hakikat komunikasi politik adalah upaya sekelompok manusia yang mempunyai orientasi, pemikiran politik atau ideologi tertentu dalam rangka menguasai, dan atau memperoleh kekuasaan demi mewujudkan tujuan pemikiran politik dan ideologi sebagaimana yang mereka harapkan (dalam Rauf, 1993: 10).

Rekrutmen politik memegang peranan penting dalam sistem politik suatu Negara karena proses ini menentukan orang-orang yang akan menjalankan fungsi-fungsi sistem politik negara itu melalui lembaga-lembaga yang ada. Oleh karena itu, tercapai tidaknya tujuan suatu sistem politik tergantung pada kualitas rekrutmen politik. Partai politik memiliki cara tersendiri dalam melakukan rekrutmen terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedural rekrutmen yang dilakukan partai politik tersebut. Tak hanya itu proses rekrutmen juga merupakan fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik, yaitu dengan cara menempuh berbagai proses penjangkaran.

C. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskripsi penelitian lebih banyak menceritakan hal-hal yang berkaitan dengan pesan komunikasi “Politik Tanpa Mahar” Partai Nasional Demokrat di wilayah Riau dan tanggapan publik terkait “Politik Tanpa Mahar” dalam tubuh partai Nasional Demokrat di wilayah Riau. Teknik pengumpulan data yang digunakan dengan wawancara dan dokumentasi berikut merupakan dari informan dan penelitian ini:

No	Nama	Jabatan
1	Bapak Fitra Asri Rama	Wakil Ketua bidang Media dan Komunikasi Publik Dewan Perwakilan Wilayah partai Nasdem Riau
2	Farida H. Saad	Anggota DPR RI Partai Nasional Demokrat 2014-2019
3	Heri Budianto	Pakar Komunikasi Politik
4	Fitri Riska	Mahasiswa Ilmu Komunikasi UR

Sumber: Olahan peneliti, 2018

D. Hasil dan Pembahasan

Salah satu fenomena terjadi dalam proses politik yang ada adalah adanya istilah “Mahar Politik”, yang dimaksud dengan istilah itu adalah, bahwa setiap orang atau kader politik yang ingin mencalonkan diri sebagai pimpinan daerah kerap kali mengalami pemerasan atau kata lain harus mengeluarkan sejumlah

dana dalam nominal yang begitu besar, dengan tujuan untuk mendapatkan dukungan atau rekomendasi politik dari partai politik yang menjadi pilihannya. Dinamika seperti ini dianggap sangat merusak iklim demokrasi di Indonesia karena akan menimbulkan dampak negatif terhadap partai politik. Masyarakat akan memberikan persepsi bahwa, hanya mereka yang memiliki dana besar yang bisa menjadi calon pemimpin yang bersumber dari jalur partai politik, sehingga akan berakibat pada sulitnya masyarakat mendapatkan calon pemimpin yang kelak ketika terpilih akan bekerja secara bersih atau jauh dari segala praktek penyimpangan dalam dunia politik, seperti korupsi, penyalahgunaan kekuasaan. Jika hal tersebut terjadi, maka rakyat akan jadi korban karena akan berakibat pada pembangunan tidak akan maksimal karena anggaran negara atau kepemilikan rakyat, yang diperuntukkan untuk pembangunan akan salah gunakan oleh para wakil rakyat yang berpikir mengambalikan biaya atau mahar politik yang telah mereka keluarkan pada saat proses pemilihan yang telah terjadi, ini satu gambaran dan fenomena yang kerap terjadi pada kepala daerah atau wakil rakyat yang lahir dari proses pemilihan kepala daerah, proses pemilihan anggota legislatif yang kental dengan Mahar Politik.

1. Pesan Komunikasi Partai Nasional Demokrat Riau melalui “Politik Tanpa Mahar”

Partai Nasdem membuka program rekrutmen bakal calon anggota legislatif, mulai dari tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan tanggal 31 Maret 2017, tetapi karena diperlukan bakal calon anggota legislatif yang berkualitas sesuai dengan harapan partai dan masyarakat, sehingga partai Nasdem sendiri memperpanjang rekrutmen penerimaan bakal calon anggota legislatif DPR RI, DPRD Prov.Riau dan DPRD Kab.Kota diwilayah Provinsi Riau. Oleh karena itu masih dibuka kesempatan masyarakat dan kader yang ingin bersama Nasdem melaksanakan dalam berpartisipasi dalam pemilu 2019 yang akan datang, perpanjangan tersebut akan berakhir pada tanggal 17 April 2017.

Jika kita melihat iklan rekrutment yang dilakukan oleh partai Nasdem pasti ada satu kalimat yang membuat kita penasaran dan bertanya-tanya apa artinya. Kalimat itu adalah “ Politik Tanpa Mahar”. Fitra selaku pihak Nasdem Riau Wakil ketua pada divisi media dan komunikasi dalam wawancara mengakui bahwa Nasdem partai ini menjadi partai politik pertama yang berani menggunakan *tagline* “politik tanpa mahar” dan mempublikasikannya secara luas dan secara besar-besaran.

Partai nasdem mengatakan bahwa mereka adalah partai terbuka bagi masyarakat yang ingin tahu lebih dalam mengenai partai Nasdem, permasalahan politik dan lainnya. Hal ini menjadi tuntutan bagi nasdem untuk bertanggung jawab terhadap berbagai aspirasi yang berasal dari masyarakat. Partai Nasdem mengusungkan tagline “politik tanpa mahar” dengan menjadikannya sebagai komitmen penting dalam partai Nasdem itu sendiri. Peluncuran tagline itu sendiri terjadi saat pola berpolitik saat ini yang dinilai kurang positif oleh berbagai kalangan. Salah satunya adalah pandangan bahwa, berpolitik selalu identik dengan *money politic* atau politik transaksional yang cenderung terjadi pada saat-saat pemilu maupun pilkada yang dianggap sudah menjadi budaya di negara kita.

Tagline tersebut yang disampaikan langsung oleh ketua umum yaitu Surya Paloh dan menjadi sebuah komitmen partai Nasdem, pengurus-pengurus pusat sampai daerah untuk melakukan politik tanpa mahar, dimana politik tanpa mahar ini baik eksternal maupun internal tidak membenarkan menerima sesuatu, tidak ingin dikatakan partai transaksional, karena itu tidak bagus cara demokrasi di Negara kita. Jadi masyarakat bebas yang ingin mendaftar diri sebagai caleg dipartai nasdem, calon anggota dewan tanpa biaya satu senpun. Itu yang sudah disepakati bersama dipartai nasdem ini. Dimana tim recruitment yang melanggar nanti tentu ada sanksi yang tegas diberikan kepada yang melanggar tersebut.

Strategi partai Nasdem dalam menarik atau memikat masyarakat yaitu dengan melakukan sosialisasi dimedia massa tentang program rekrutmen baca tagline ini, mereka juga mensosialisasikan kepada masyarakat secara langsung, supaya masyarakat ikut terlibat dalam pemilu 2019 nanti, strategi mereka bagaimana masyarakat dengan kesadaran politik dengan menngabung partai nasdem,dengan menyuarakan agenda besar,disinilah masyaarakat diajak untuk terlibat dalam sebuah agenda besar itu. Menarik masyarakat untuk kesadaran politik, kita suarakan dimana-mana. Dengan adanya politik tanpa mahar tersebut itu juga merupakan upaya masyarakat tidak lagi melakukan politik transaksional secara etika kebangsaan kita, budaya kita, dan ini tidak perlu dilakukan lagi.

Partai Nasdem ini lebih banyak melakukan publikasi dengan menggunakan peran pada media massa, media sosial, dan disosialisasi secara langsung dimasyarakat umum.Media sosialisasi yang digunakan dalam recruitment anggota partai nasdem televisi, media sosial dengan whatsapp, media cetak Riau Pos, media online : website Nasdem riau hingga sosialisasi secara langsung/ turun kelapangan: pengurus kab/ kota pada saat tertentu. Dimedia sosial juga berperan agar masyarakat juga tertarik dengan partai Nasdem tersebut. Partai Nasdem tersebut tidak menjanjikan apa-apa setelah mereka mengikuti dalam kompetisi tersebut, untuk menjadi wakil rakyat tersebut ditentukan oleh banyak faktor termasuk integritas, elaktabilitias, dukungan masyarakat, tingkat populalitasnya.

Politik tanpa mahar adalah politik yang memberikan warna baru di Indonesia dengan tujuan mengubah pola pikir yang selama ini dalam pelaksanaan demokrasi harus menggunakan sesuatu dalam bentuk materi yang dianggap tidak mencerdaskan. Sehingga dalam merekrut seperti anggota dewan dan calon kepala daerah dalam hal pelaksanaan pilkada.Partai Nasdem memiliki misi yaitu tidak ingin para calon, yang ingin menjadi bagian dalam menduduki mandat yaitu menjadi wakil rakyat dibebankan dengan senominal uang yang nanti akan berdampak negatif bagi kinerja wakil rakyat itu sendiri. Inilah yang menjadi tujuan Nasdem yang menginginkan politik yang menggunakan hati nurani, tanpa mahar sehingga setiap yang ingin bergabung dengan partai Nadem itu dikarenakan ketulusan membantu memperjuangkan demokrasi dan membantu dalam bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat.

Untuk mewujudkan filosofis ini perlu adanya kesadaran bersama baik dari kader Nasdem maupun masyarakat. Terutama dari kader Nasdem itu sendiri, bahwa setiap kader harus memiliki kesadaran untuk tidak menjadikan agenda politik untuk menguntungkan diri sendiri. Para kader harus melakukan perubahan

yang menjadi agenda besar partai Nasdem yaitu restorasi Indonesia, semua itu tentunya harus dimulai dari niat dan itikad untuk memajukan masyarakat bukan melakukan berbagai agenda politik di tengah masyarakat untuk mengambil keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Hal inilah yang mendorong Nasdem mendidik kadernya karena sebuah perubahan harus dimulai dari internal partai itu sendiri. Jika terdapat kader yang menggunakan politik transaksional untuk mendapatkan keuntungan pribadi, pihak partai sendiri akan memberikan sanksi yang tegas karena Nasdem sudah berkomitmen untuk melaksanakan politik tanpa mahar. Seperti dalam pemilihan kepala daerah, pihak Nasdem bertekad untuk tidak mengambil suatu hal untuk kepentingan pribadi tetapi tujuannya adalah bagaimana calon kepala daerah ini nantinya bisa dengan benar melakukan apa yang diinginkan masyarakat.

Melakukan politik dengan mahar akan berdampak luas, salah satunya adalah ketika calon pemimpin menggunakan politik transaksional disaat masa pemilihan nantinya akan muncul keinginnya untuk mendapatkan kembali apa yang sudah dikeluarkan atau dihabiskan selama masa pemilihan. Politik dengan mahar mendorong para kader untuk menginginkan *feedback* terhadap apa yang sudah mereka berikan, yang pada akhirnya berdampak negatif pada penyelenggaraan pemerintahan dan penggunaan APBD hal ini dibuktikan dengan banyaknya kepala daerah yang terjerat dengan hukum. Nasdem juga menghimbau masyarakat untuk mulai meninggalkan anggapan tentang politik transaksional sekaligus juga mengajak masyarakat untuk tidak memilih para calon pemimpin dengan melihat dari seberapa banyak biaya yang dikeluarkannya selama masa pemilihan.

Dengan mengangkat paradigma baru dalam pesta demokrasi, partai Nasdem menjadi partai pertama yang berani mengusung politik tanpa mahar. Selama kegiatan *open recruitment*, terlihat adanya antusias yang besar masyarakat, ada banyaknya masyarakat yang ingin ikut menjadi bacaleg. Mempublikasikan politik tanpa mahar melalui baliho yang dipasang di berbagai tempat sebagai sebuah sosialisasi membuat banyak masyarakat yang tertarik dan ingin tahu dengan apa yang menjadi komitmen partai nasdem sekaligus mengubah pikiran masyarakat mengenai politik dengan mahar dan mengubah pragmatisme. Para bacaleg tidak dikenakan biaya mulai dari pendaftaran hingga selama diikutkan dalam kegiatan pelatihan, ini menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan politik tanpa mahar. Kegiatan tanpa mahar ini juga berlaku terhadap kegiatan-kegiatan lainnya termasuk selama masa pemilihan.

Meskipun demikian Farida H. Saad selaku anggota DPR utusan dari Partai Nasional Demokrat menilai bahwa dalam realisasinya rekrutmen 'politik tanpa mahar' sangatlah baik bahwa dengan tagline tersebut menampilkan sisi positif Nasdem namun tetap berusaha menjalankannya meski masih kurang pendaftar terutama dari bakal calon legislatif perempuan.

2. Tanggapan Publik mengenai “Politik Tanpa Mahar” Partai Nasional Demokrat

Sebagai anggota partai juga harus menyadari hak dan tanggung jawab menjadi anggota partai Nasdem, seperti; mengikuti pelatihan-pelatih, training-

training mengenai partai politik, memasang atribut kampanye, wajib melakukan sosialisasi memberikan informasi mengenai program-program yang dilakukan jika menjadi dewan dan wajib mendekatkan diri kepada masyarakat, dsb. Untuk itu pendidikan politik guna menumbuhkan keunggulan karakter anggota.

Sebuah partai politik yang baik tentunya mengharapkan calon kader-kader politiknya memiliki karakter yang cerdas untuk itu dalam melaksanakan pendidikan politik kader, untuk menunjukkan konsistensi dalam mengukung politik tanpa mahar, partai Nasdem melakukan beberapa program pendidikan politik yang kontinyu kepada kader-kadernya, salah satunya ialah memberikan pendidikan politik yang diberi nama sekolah restorasi dengan tujuan membina kader-kadernya dalam upaya realisasi politik tanpa mahar dapat berjalan. Target dari sekolah ini sendiri adalah para kader yang masih dalam tahap bakal calon dan juga para DPR maupun DPRD terpilih yang berasal dari partai Nasdem. Pelatihan yang dilakukan yaitu pelatihan bersosialisasi dengan masyarakat, pelatihan trobosan partai nasdem, pengarahan dari DPP serta pembinaan untuk melaksanakan politik tanpa mahar.

Melakukan semua kegiatan dengan komitmen tanpa mahar menimbulkan pertanyaan dari mana sumber dana partai Nasdem. Pihak Nasdem sendiri mengatakan bahwa sebagai partai peserta pemilu tahun 2014 tentunya sudah menerima bantuan dana dari pemerintah daerah melalui *cash bank polimas* untuk bantuan partai politik, kemudian dari sumbangan-sumbangan kader yang ingin melakukan kegiatan politik. Sehingga penggunaan anggaran internal partai dapat dilakukan transparan sehingga masyarakat tahu bagaimana penggunaan dana-dana tersebut. Dengan transparansi ini Nasdem ingin menjadi partai milik masyarakat.

Dari awal pendirian partai Nasdem sudah berkomitmen melakukan restorasi (memperbaiki) Indonesia terutama dalam hal budaya berpolitik yang selalu dikaitkan dengan uang. Sehingga partai tidak di identikkan dengan kekuasaan dan perilaku negatif. Beberapa waktu lalu partai Nasdem Riau mendapatkan penghargaan dari Komisi Informasi Riau Award 2016 sebagai partai terbaik dalam melaksanakan keterbukaan informasi ke publik.

Selama pelaksanaan politik tanpa mahar ini ada beberapa kendala yang dihadapi oleh partai Nasdem mulai dari adanya komentar-komentar negatif dari partai politik dan masyarakat yang membuat munculnya pandangan-pandangan negatif, namun di pihak Nasdem sendiri menganggap hal semacam ini adalah sesuatu yang wajar. Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Riau, Fitri memberikan tanggapan terhadap tagline Politik Tanpa Mahar yang positif, dimana selama ini terdengar jelas dikalangan masyarakat korelasi antara uang, partai dan politisi. Dengan tagline tersebut, muncul sedikit kepercayaan terhadap dunia politik. dimana masih ada partai yang berani menunjukkan bahwa mereka tidak memungut uang.

Sebagai pengamat komunikasi politik nasional, Heri Budianto memberikan tanggapan 'politik tanpa mahar', Mahar itu adalah calon menyediakan uang untuk partai, kemudian lama-lama melihat bahwa *cost* politik ini di identikkan dengan calon sehingga politik tanpa mahar itu positif. Justru calon kepala daerah tanpa mahar itu bisa kita menarik orang yang lebih potensial, potensi untuk memimpin, membangun dan sebagainya untuk maju dari jalur partai

politik lalu kemudian langsung memiliki calon figur yang baik ; berkualitas dan memiliki kompetensi. Kalau semua orang atau partai menggunakan mahar, calon calonnya orang-orang yang memiliki uang saja.

Partai nasdem merupakan partai politik pertama di Indonesia yang secara luas mempublikasikan tagline atau gebrakan baru partai dalam dunia politik dengan mengusung “politik tanpa mahar”, akan tetapi sesuai dengan konsep pemasaran politik yaitu *positioning* dan *branding*, sehingga hal tersebut akan berpengaruh terhadap konsistensi partai dalam menjalankan gebrakan politik tanpa mahar. Semua partai politik harus menggunakan pola seperti ini, bukan hanya sebagai *positioning* atau strategi politik tetapi juga memberikan kesempatan kepada putra terbaik bangsa untuk dapat melalui semua jalur partai politik.

E. Kesimpulan

Politik tanpa mahar adalah politik yang memberikan warna baru di Indonesia dengan tujuan mengubah pola pikir yang selama ini dalam pelaksanaan demokrasi harus menggunakan sesuatu dalam bentuk materi yang dianggap tidak mencerdaskan. Melalui strategi komunikasi politik “politik tanpa mahar” partai Nasional demokrat dapat penulis menarik kesimpulan :

1. Proses pesan yang dikomunikasi kaderisasi Partai politik Nasional Demokrat Wiayah Riau dengan mengusung tagline “politik tanpa mahar” menanamkan kesadaran internal dari partai maupun eksternal masyarakat bakal calon kader bahwa Nasdem tidak membebani dengan mahar baik dalam pencalonan maupun jika terpilih dalam PILEG 2019. Calon kader harus memiliki kesadaran untuk tidak menjadikan agenda sebagai hal dapat memberikan keuntungan bagi diri sendiri. Para kader harus melakukan perubahan yang menjadi agenda besar partai Nasdem yaitu restorasi Indonesia, semua itu tentunya harus dimulai dari niat dan itikad untuk memajukan masyarakat bukan melakukan berbagai agenda politik di tengah masyarakat untuk mengambil keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.
2. Tanggapan “Politik Tanpa Mahar” merupakan suatu proses mengaktifkan unsur-unsur dinamis yang diarahkan kepada sistem tertentu yang berdasarkan kepada pola keyakinan tertentu pula. Terutama didalam mentransformasi nilai politik kepada generasi penerus berikutnya. Partai Nasional Demokrat sebagai motor penggerak dalam proses pendidikan politik, hendaknya agar terus menjaga konsistensi dalam upaya realisasi tagline politik tanpa mahar yang telah diusungnya. Nasdem mendidik kadernya karena sebuah perubahan harus dimulai dari internal partai itu sendiri. Jika terdapat kader yang menggunakan politik transaksional untuk mendapatkan keuntungan pribadi, pihak partai sendiri akan memberikan sanksi yang tegas karena Nasdem sudah berkomitmen untuk melaksanakan politik tanpa mahar. Hal tersebut yang apabila dijalankan secara berkelanjutan tentunya akan berdampak positif bagi kepercayaan masyarakat terhadap keberadaan partai politik dan segala atribut politik lainnya.

Daftar Pustaka

BUKU

- Arifin, Anwar. 2011. *Komunikasi Politik*. Yogyakarta.:Graha Ilmu Haris. 2006. *Politik Organisasi*. Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Alfian. 1993. *Komunikasi Politik dan Sistem Politik di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Allthof, Phillip. Michael Rush. 1995. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Raja Grafindo
- Firmasyah. 2008. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Nimmo, Dan. 1993. *Komunikasi Politik, Komunikator, Pesan dan Media*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Junaedi, Fajar; 2013, *Komunikasi Politik Teori,Aplikasi dan Strategi* di Indonesia.
- Moleong, lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mulyana, Deddy. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Semiawan,Prof. Dr. Conny R.2010,*Metode Penelitian Kualitatif*, Grasindo. Jakarta.

Website

- Mutty, Luthfi A; *Dinasti Politik dan Gagalnya Kaderisasi Parpol*
<http://partainasdem.id/2017/01/09/dinasti-politik-dan-gagalnya-kaderisasi-parpol/> akses 31032017, 01.30 wib

Jurnal

- Nurazizah,*Kaderisasi Partai NASDEM Dalam Menghadapi Pemilu Legislatif 2014 Di Kabupaten Maros*, Jurnal Otoritas Vol.V No.1. 2015

Skripsi

- Nainggonal, Harry ;*Komunikasi Politik Partai Nasional Demokrat (NasDem) Dalam Pembentukan Citra Menjelang PEMILU Legislatif 2014 DI Provinsi Riau*, Universitas Riau, 2013